

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Nanga Bulik, Juni 2025
Pegguna Anggaran,

AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM., M.Si
NIP. 19750911 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keuangan Audited SOPD Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan Audited SOPD Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau merupakan wujud pertanggungjawaban Pengguna Anggaran terhadap program dan kegiatan (alokasi anggaran) yang dikelola dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Lamandau yang tertuang dalam DPA SOPD / DPPA SOPD Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Audited Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Keuangan Audited ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pihak terkait sangat diperlukan demi penyempurnaan Laporan Keuangan Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dimasa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2025

Pengguna Anggaran,

AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM., M.Si
NIP. 19750911 199803 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

LAPORAN vi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN : 1

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1. Data Umum SOPD 1

 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SOPD 2

 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SOPD 3

 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SOPD 3

 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SOPD 5

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SOPD 8

 2.1. Kebijakan Keuangan 8

 2.2. Pencapaian Target Kinerja SOPD 8

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SOPD 13

 3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD 13

 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target 13

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI 14

 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan SOPD 14

 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SOPD ... 14

 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SOPD . 15

 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SOPD 16

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SOPD 17

 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 17

 5.1.1 Belanja 17

 5.1.1.1 Belanja Operasi 17

 5.1.1.1.1 Belanja Pegawai 17

 5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18

 5.1.1.2 Belanja Modal 20

 5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20

 5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21

 5.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 22

 5.1.3 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 22

 5.2 Penjelasan Pos – Pos Neraca 22

 5.2.1 Aset 22

 5.2.1.1 Aset Lancar 22

 5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka 23

 5.2.1.1.2 Persediaan 24

 5.2.1.2 Aset Tetap 25

 5.2.1.2.1 Tanah 26

 5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin 26

5.2.1.2.3	Gedung dan Bangunan	27
5.2.1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
5.2.1.2.5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
5.2.1.3	Aset Lainnya	28
5.2.1.3.1	Aset Lain – lain	29
5.2.1.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	29
5.2.2	Kewajiban	30
5.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	30
5.2.3	Ekuitas	30
5.2.4	Kewajiban dan Ekuitas	31
5.3	Kegiatan Operasional	31
5.3.1	Pendapatan – LO	31
5.3.1.1	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
5.3.2	Beban – LO	33
5.3.2.1	Beban Operasi	34
5.3.2.1.1	Beban Pegawai	34
5.3.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	35
5.3.2.1.2.1	Beban Persediaan	37
5.3.2.1.2.2	Beban Jasa	37
5.3.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	38
5.3.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	39
5.3.2.1.3	Beban Penyusutan	39
5.3.2.2	Surplus/Defisit LO	40
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	40
BAB VI: PENUTUP		42
LAMPIRAN		43

LAPORAN

1. LRA
2. NERACA
3. LO
4. LPE
5. CALK
6. LAMPIRAN - LAMPIRAN